

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan proses bisnis, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yaitu memperoleh laba. Hal ini tidak hanya diharapkan oleh orang yang bekerja di dalam perusahaan saja (manajer), tetapi juga oleh investor. Investor atau pemegang saham serta manajer memiliki tujuan yang sama. Namun, investor adalah orang yang berada di luar perusahaan sehingga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan secara lebih dekat. Oleh karena itu, investor membuat suatu kontrak dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan sebagai gantinya manajer akan menerima imbalan. Di sinilah terjadi hubungan keagenan.

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa dalam teori keagenan pemegang saham adalah prinsipal dan manajemen sebagai agen. Hubungan keagenan terjadi saat adanya kontrak antara satu orang atau lebih, dimana prinsipal (pemegang saham) memberikan suatu perintah terhadap agen (manajer) untuk melakukan suatu tugas atas nama prinsipal (pemegang saham) sekaligus memberi wewenang untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Manajer adalah pihak yang dikontrak pemegang saham, oleh karena itu mereka wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada pemegang saham. Kontrak yang efisien biasanya memenuhi dua faktor. Faktor pertama yaitu prinsipal dan agen mempunyai kualitas informasi yang sama (informasi simetris) dan tidak ada yang disembunyikan demi keuntungan pribadi. Faktor kedua adalah agen memiliki kepastian yang tinggi tentang imbalan yang akan diterima. Tetapi, pada prakteknya informasi simetris dalam faktor pertama tidak pernah terjadi karena manajer bekerja langsung dalam mengelola perusahaan sehingga mengetahui betul kondisi perusahaan serta informasi yang dimiliki pun lebih banyak daripada prinsipal atau investor yang memiliki lebih sedikit informasi karena tidak mengelola perusahaan secara langsung (Yushita, 2010). Kontrak efisien pun tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi asimetri informasi.

Asimetri informasi yang dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap manajer yang dianggap ingin memenuhi kepentingan diri pribadi. Situasi ini membuat pemegang saham mendesak manajer untuk memberikan informasi yang cukup. Informasi yang diinginkan oleh pemegang saham tersebut dituangkan manajer dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi mengenai keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, namun informasi yang ada masih banyak yang sifatnya historis. Oleh sebab itu, laporan keuangan dirasa belum cukup karena dalam kondisi ekonomi yang semakin pelik, informasi yang sifatnya historis dianggap kurang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham atau investor. Informasi historis tidak lagi mampu untuk memberikan gambaran mengenai faktor penting kesuksesan, peluang, risiko, serta rencana manajemen ditilik dari sisi masa depan kepada para investor. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mengatasi masalah ini adalah informasi *forward-looking*. Dengan adanya informasi masa depan ini, investor dapat mengestimasi kondisi masa depan beserta risiko-risiko yang ada sehingga lebih yakin dalam melakukan investasi.

Forward-looking information merupakan informasi yang memberikan proyeksi atau gambaran mengenai bagaimana bisnis perusahaan di masa depan. Informasi *forward-looking* dibutuhkan oleh pemegang saham atau investor untuk memprediksi serta mengevaluasi kinerja perusahaan di masa depan (Alkhatib, 2014). Pengungkapan informasi *forward-looking* terdiri dari informasi keuangan dan non keuangan (Aljifri dan Hussainey, 2007). Dalam pengungkapan informasi *forward-looking* terdapat rencana saat ini dan perkiraan atau prospek masa depan perusahaan yang memungkinkan investor dan pengguna lain laporan tahunan untuk menilai kinerja keuangan masa depan perusahaan. Informasi ini tentunya sangat dibutuhkan oleh investor guna menjadi tolak-ukur atas perusahaan yang memiliki kinerja baik. Selain itu, *forward-looking information* juga dapat meningkatkan kemampuan investor dalam menilai arus kas di masa mendatang

dan memprediksi pendapatan di masa depan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik.

Di Indonesia, peraturan mengenai pengungkapan informasi *forward-looking* terdapat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 30/SEOJK.04/2016 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengungkapan informasi *forward-looking* disajikan dalam beberapa bagian dari laporan tahunan, yaitu laporan direktur, laporan dewan komisaris, diskusi, dan analisis manajemen. Namun, aturan pengungkapan di Indonesia tidak menjelaskan dan menyebutkan sanksi apapun bagi perusahaan yang tidak mematuhi (Maghfira dan Tresnaningsih, 2018). Dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 30/SEOJK.04/2016 oleh OJK, perusahaan diharapkan mampu dan bersedia untuk mengungkapkan informasi *forward-looking* pada laporan tahunannya. Tindakan pengungkapan ini merupakan salah satu metode yang dapat perusahaan gunakan untuk meyakinkan para pemegang saham atau investor bahwa perusahaan memiliki rekam jejak yang baik serta memiliki anggota dewan direksi yang efektif sehingga pihak perusahaan dapat memperoleh kepercayaan lebih yang diberikan oleh para pemegang saham.

Pada kenyataannya, meskipun sudah ada peraturan yang berlaku tentang ini, tingkat pengungkapan informasi *forward-looking* di Indonesia masih rendah. Jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia yang mengungkapkan informasi *forward-looking* hanya sekitar 32,6% (Maghfira dan Tresnaningsih, 2017). Rendahnya tingkat pengungkapan informasi *forward-looking* ini disebabkan adanya ketidakpastian tentang masa depan. Selain itu, perkiraan yang salah oleh manajer dapat menimbulkan biaya litigasi. Oleh karena itu ketidakpastian tentang masa depan ini membuat manajer segan untuk melakukan pengungkapan informasi *forward-looking*, sebab hukum tidak bisa membedakan jika manajer melakukan kesalahan perkiraan atau terdapat bias manajemen (Healy dan Palipu, 2001).

Pada sepanjang tahun 2018, Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menurun dan masih tertinggal 162 poin dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Tercatat ada sepuluh saham yang

kinerjanya paling buruk di antara saham-saham lainnya, yaitu saham milik PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Sidomulyo Selaras Tbk, PT Trikonsel Oke Tbk, PT Dwi Guna Laksana Tbk, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk, PT Cahayasakti Investindo Tbk, PT Panasia Indo Resources Tbk, PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Campina Ice Cream Industry Tbk, dan PT Intan Baruprana Finance Tbk. Terdapat tiga faktor eksternal yang dinilai menjadi penyebab anjloknya IHSG ini. Faktor pertama adalah *yield bond* yang naik, sehingga banyak dana yang ada di pasar saham beralih ke surat utang negara karena dianggap menjanjikan *return* yang lebih tinggi. Faktor berikutnya adalah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS sehingga memiliki dampak keluarnya dana asing dari pasar saham. Faktor yang terakhir berasal dari dalam negeri, yaitu dampak perang dagang dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Karena adanya perang dagang, banyak investor menjadi takut sehingga sedikit banyak berdampak pada pasar saham termasuk Indonesia. Hal-hal di atas menjadi pekerjaan rumah bagi pihak manajemen maupun pemerintah untuk lebih dini melakukan persiapan dalam menghadapi krisis bisnis guna meminimalkan tingkat kerugian yang dialami. Namun sejatinya pemerintah belum mengeluarkan kebijakan apapun dalam menghadapi anjloknya harga saham di tahun 2018. Barulah pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka terkait penanganan pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan menanggapi dengan meningkatkan frekuensi *assessment forward-looking* pada lembaga jasa keuangan guna mengantisipasi apa yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemik virus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa pengungkapan informasi *forward-looking* sangat penting dalam menangani saat genting dalam berbagai krisis keuangan.

Penelitian di Indonesia yang membahas mengenai pengungkapan informasi *forward-looking* di Indonesia masih sangat minim, sehingga diperlukan penelitian mengenai pengungkapan informasi *forward-looking*. Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi *forward-looking* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

kepemilikan manajerial, direktur independen, dan dewan komisaris (Liu, 2015; Ikpor, Awa, dan Ozor., 2016; Maghfira dan Tresnaningsih., 2017; Dzaraly, Lokman, dan Othman, 2018).

Faktor pertama adalah kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (Wahidahwati, 2002; dalam Rustendi dan Jimmi, 2008). Apabila pihak manajer memiliki saham yang besar di perusahaan, maka manajer merasa memiliki dan bertanggung jawab atas perusahaan sehingga manajer akan berusaha melakukan pengungkapan selengkap mungkin termasuk pengungkapan informasi *forward-looking*. Hal ini membuat semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka mengakibatkan pengungkapan informasi *forward-looking* yang semakin tinggi pula (Dzaraly, dkk., 2018). Sebaliknya, Liu (2015) berpendapat bahwa pihak manajer memiliki informasi yang lebih banyak daripada investor, namun pihak manajer cenderung enggan untuk mengungkapkan informasi yang dianggap tidak menguntungkannya meskipun manajer memiliki saham perusahaan, sehingga ditemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*.

Faktor kedua adalah direktur independen merupakan seseorang dari pihak manajemen yang bebas dari hubungan bisnis atau relasi manapun yang memungkinkan terganggunya pelaksanaan direktur tersebut dalam melakukan penilaian independen atau kemampuan untuk bertindak demi kepentingan perusahaan (Dzaraly, dkk., 2018). Direktur independen memiliki lebih banyak kendali dan tanggung jawab atas penilaiannya serta merupakan pakar keputusan yang bertindak sebagai pengaruh positif atas keputusan dan pertimbangan dewan (Ikpor, dkk., 2016). Oleh karena itu, perusahaan dengan jumlah direktur independen yang lebih banyak akan cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan informasi *forward-looking* (Fama dan Jensen, 1983; Taliyang dan Jusop, 2011). Namun, Dzaraly, dkk. (2018) berpendapat bahwa banyak perusahaan yang meskipun memiliki direktur independen memiliki kecenderungan tidak benar-benar independen dan masih memiliki keberpihakan,

karenanya itu tidak ada pengaruh antara direktur independen terhadap pengungkapan informasi *forward-looking*.

Faktor ketiga adalah dewan komisaris merupakan bagian dari struktur perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* (GCG), namun dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional (Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2006). Tanggung jawab penuh yang dimiliki oleh dewan komisaris membuatnya memperketat pengawasan terhadap direksi dalam menyajikan pengungkapan informasi yang transparan kepada investor, sehingga semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi *forward-looking* (Maghfira dan Trenaningsih, 2017). Berbeda dengan hasil penelitian Liu (2015) yang menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris dapat menghambat efisiensi kinerja perusahaan sehingga berimbas pada tidak signifikannya tingkat pengungkapan informasi *forward-looking*.

Objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada kompleksitas kerja yang tinggi pada sektor manufaktur sehingga memudahkan sektor ini terkena dampak langsung saat terjadi krisis perekonomian yang memerlukan pencegahan melalui pengungkapan informasi *forward-looking*. Periode penelitian tahun 2017-2019 dipilih karena merupakan data terbaru sehingga dianggap relevan dengan keadaan saat ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah kepemilikan manajerial, direktur independen, dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, direktur independen, dan dewan komisaris, terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Sebagai pembanding atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis yaitu pengaruh kepemilikan manajerial, direktur independen, dan dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi *forward-looking* pada perusahaan manufaktur di BEI.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi investor mengenai pentingnya pengungkapan informasi *forward-looking* sehingga investor dapat mengawasi manajer untuk melakukan tugasnya dengan baik yang akan dapat berguna untuk tolok ukur dan juga pertimbangan sebelum melakukan investasi pada perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, meliputi: teori keagenan, pengungkapan informasi *forward-looking*, kepemilikan manajerial,

direktur independen, dan dewan komisaris. Selain itu juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran baik akademis maupun parktis.